

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki peran yang besar dalam sejarah berdirinya organisasi kawasan di Asia Tenggara yaitu ASEAN. Buktinya saja, Indonesia merupakan salah satu dari lima *founding father* ASEAN yang ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok. Indonesia juga gencar mengusahakan terciptanya kerjasama dengan negara anggota lainnya di berbagai bidang dalam ASEAN. Selain itu, sejak berdirinya ASEAN pada tahun 1967 sampai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah tiga kali menjabat sebagai ketua ASEAN yaitu pada tahun 1976, 2003, dan 2011. Sebagai salah satu *founding father* Indonesia jelas memegang porsi yang besar dalam menjaga keutuhan ASEAN.¹ ASEAN sendiri adalah sebuah organisasi kawasan yang bertujuan untuk mewadahi kerjasama negara anggota agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, juga kerjasama di berbagai sektor atas nama kepentingan bersama.²

Terkait dengan hubungan Indonesia dan ASEAN, Dewi Fortuna Anwar menyebutkan bahwa ASEAN memiliki delapan fungsi penting bagi Indonesia; untuk menjaga kredibilitas internasional negara, sebagai instrumen untuk mempertahankan keharmonisan regional, menjadi wadah bagi kerjasama militer bilateral diantara negara anggota, sebagai *buffer* bagi keamanan nasional Indonesia, untuk mempromosikan aturan regional, sebagai instrumen untuk negoisasi di kancah

¹ Sofia Trisni, Poppy Irawan. "Strategi Indonesia dalam Merespon Kebangkitan Tiongkok pada Masa Kepemimpinan Presiden SBY (Studi Kasus: Konflik Laut Tiongkok Selatan)." *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 5, no. 2 (2016): 129-150.

² Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN. Selasa, 17 Maret 2015.
<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/ASEAN/Pages/Sejarah-dan-Latar-Pembentukan-ASEAN.aspx>. diakses 29 November 2018

internasional, berperan dalam mendukung perkembangan ekonomi kawasan, dan untuk meningkatkan status Indonesia di level internasional.³

Sengketa antara ASEAN dengan Tiongkok terkait dengan Laut Tiongkok Selatan bermula pada tahun 1947. Di tahun itu, Tiongkok mempublikasikan peta yang mengklaim sebagian besar wilayah Laut Tiongkok Selatan. Pada tahun 1949 Partai Komunis berhasil mengambil alih kekuasaan di Tiongkok dan berlanjut dengan mengumumkan sembilan garis putus-putus (*nine dash lines*) di sekitaran kawasan Laut Tiongkok Selatan yang kemudian dimasukkan ke peta resmi Tiongkok pada tahun 1953. Dalam peta tersebut, tercantum didalamnya Kepulauan Spartyly dan Paracel yang merupakan teritorial Vietnam, dan Scarborough Reef yang merupakan teritorial Filipina. Pada tahun 1995, ASEAN mulai menjadi representatif dalam memperjuangkan kepentingan negara anggotanya terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan setelah Filipina menyampaikan protesnya melalui ASEAN.⁴

Sehubungan dengan sengketa Laut Tiongkok Selatan, dari tahun 1993 Indonesia telah berupaya menyelesaikan masalah yang menyangkut teritorial Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia melalui diplomasi dengan Tiongkok dengan berupaya agar ruang lingkup lain yang berkaitan dengan hubungan Indonesia-Tiongkok tidak terganggu. Berlanjut dengan penegasan dari pihak pemerintah Indonesia bahwa Indonesia dan Tiongkok tidak memiliki sengketa teritorial, kemudian Indonesia

³ Dewi Fortuna Anwar saat ini menjabat sebagai Profesor Riset dan Wakil Ketua Bidang Ilmu Sosian dan Humanioradi LIPI, juga menjabat sebagai Direktur Program dan Penelitian di The Habibie Center. Informasi lengkap dapat diperoleh di

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SS-BVTWg4DeJ:dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30074426/anwar-timedsummary-2014.pdf+&cd=6&hl=en&ct=clnk&gl=us>

⁴ Tempo.co. 12 Juli 2016. Ini Perjalanan Sengketa Kawasan Laut Tiongkok Selatan.

<https://dunia.tempo.co/read/787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-laut-Tiongkok-selatan/full&view=ok>. diakses 6 Maret 2019.

menawarkan diri untuk menjadi mediator dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan beberapa negara anggota ASEAN.⁵

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, aktivitas promosi demokrasi dijadikan sebagai *hallmark* kebijakan luar negeri Indonesia, dimana demokrasi dijadikan sebuah agenda kebijakan pemerintah dengan tujuan mendapatkan citra sebagai warga dunia yang baik di mata dunia internasional.⁶ Dalam kuliah umum dengan judul *Indonesia's Foreign Policy Under President Joko Widodo*, Dewi Fortuna Anwar menyebutkan bahwa pada masa pemerintahan Presiden SBY Indonesia sangat aktif di ASEAN termasuk menghadiri forum-forum multilateral karena adanya ketertarikan SBY di aktivitas global.⁷ Sebagai aktor yang menjadi kunci dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, Presiden SBY menjadikan ASEAN sebagai pusat dari kebijakan luar negeri Indonesia.⁸

Terkait dengan sengketa Laut Tiongkok Selatan, dalam KTT ke-24 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden SBY menyatakan bahwa Indonesia merasa terpanggil untuk berada di garda terdepan dalam menyelesaikan sengketa dengan damai.⁹ Usaha penyelesaian sengketa juga tetap dilaksanakan secara maksimal oleh Indonesia meskipun setelah tidak lagi menjabat sebagai Ketua ASEAN pada masa pemerintahan Presiden SBY. Perkembangan penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan pada masa pemerintahan Presiden SBY yaitu : Pada tahun 2011, Tiongkok

⁵ D. E. Weatherbee. (2016). Re-Assessing Indonesia's Role in the South China Sea. *ISEAS Perspective*, 18(2016), 1.

⁶ Jürgen Rüländ. "Democratizing Foreign-Policy Making in Indonesia and the Democratization of ASEAN: A Role Theory Analysis." *TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia* 5, no. 1 (2017): 49-73.

⁷ Dewi Fortuna Anwar. "Indonesia's Foreign Policy Under President Jokowi". RSIS Distinguished Public Lecture. Youtube video. Diakses 15 Desember 2018.

⁸ Desker, B. (2010). Is Indonesia Outgrowing ASEAN?.2.

⁹ Rizki Gunawan. 12 Mei 2014. SBY : Indonesia Terdepan Damaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan. <https://www.liputan6.com/global/read/2048913/sby-Indonesia-terdepan-damaikan-konflik-laut-tiongkok-selatan>. diakses 6 Maret 2019.

dan ASEAN berhasil menyepakati *Guideline for for the Implementation of the DOC (Declaration on Conduct of the Parties in the South Tiongkok Sea)* pada Pertemuan 44th AMM/PMC/18th ARF, di Bali; Pada tahun 2012, pendekatan dan konsultasi intensif (*shuttle diplomacy*) dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN terkait posisi bersama dilakukan oleh Menlu RI pada tanggal 18-19 Juli 2012 dalam menyikapi perbedaan pandangan dalam menyikapi situasi di Laut Tiongkok Selatan. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan disepakatinya ASEAN's *Six Point Principles on the South China Sea* pada tanggal 20 Juli 2012;¹⁰ Pada tahun 2013 terjadi perkembangan positif yaitu tercapainya kesepakatan antara Tiongkok dengan ASEAN untuk memulai konsultasi formal mengenai *Code of Conduct* di Laut Tiongkok Selatan sebagai hasil dari diplomasi yang telah dilakukan.¹¹

Berbeda dengan SBY, Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah dimulai semenjak tanggal 20 Oktober 2014 dikenal sebagai figur yang *inward looking*. Kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Jokowi menerapkan diplomasi membumi atau pro-rakyat yang diartikan dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai pusat dari aktivitas diplomasi luar negeri Indonesia dengan tujuan mengamankan kebutuhan rakyat lebih dahulu. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, menekankan tiga arah derivatif sebagai turunan dari diplomasi pro-rakyat yang salah satunya adalah aktif mengadakan mekanisme bilateral sebagai instrumen diplomatik dibandingkan forum-forum multilateral. Artinya, Indonesia akan mengurangi keaktifannya dalam berpartisipasi menjadi anggota forum-forum multilateral. Hal ini dapat dilihat dari ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam forum-forum multilateral seperti United Nation, OIC Summit dan beberapa

¹⁰ Kementerian Luar Negeri RI. 28 Februari 2013. Laut Tiongkok Selatan. <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Laut-Tiongkok-Selatan.aspx>. diakses 6 Maret 2019.

¹¹ Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia R.M. Marty M. Natalegawa Tahun 2014. 5.

forum-forum ASEAN. Kebijakan penenggelaman kapal *illegal fishing* asing yang memasuki teritorial Indonesia yang kebanyakan adalah milik negara anggota ASEAN

Perubahan orientasi politik luar negeri Indonesia di pemerintahan Jokowi menimbulkan kekhawatiran dari banyak pihak bahwa Indonesia akan menarik diri dari ASEAN dan menjadi negara yang *too self-serving, too inward looking, too nationalistic*, dan mengabaikan komitmen regional.¹² Rizal Sukma¹³ Dalam sebuah forum publik di Washington D.C. menyatakan bahwa saat ini, ASEAN bukan lagi satu-satunya *cornerstone*, namun hanya merupakan salah satu dari *cornerstone* politik luar negeri Indonesia.¹⁴ Asumsi diatas begitu kuat sehingga pemerintahan Presiden Jokowi harus membantahnya berulang kali dalam setiap kesempatan.¹⁵

Terkait dengan Sengketa Laut Tiongkok Selatan, pemerintahan Presiden Jokowi menyatakan akan terus mendorong agar *Code Of Conduct (COC)* dapat segera diselesaikan.¹⁶ Perkembangan penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yaitu : Kesepakatan penyelesaian *Code Of Conduct of the South China Sea* dalam kurun waktu tiga tahun kedepan pada KTT ASEAN - Tiongkok November 2018 ;¹⁷ Kesepakatan Tiongkok-ASEAN terhadap karangka CoC pada Pertemuan ke-14 ASEAN - Tiongkok *Senior Officials Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China*

¹² Dewi Fortuna Anwar. "Indonesia's Foreign Policy Under President Jokowi". RSIS Distinguished Public Lecture. Youtube video. Diakses 15 Desember 2018.

¹³ Rizal Sukma adalah Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris. Informasi lengkap dapat diperoleh di https://www.csis.or.id/blog/researchers_dir/page/rizal_sukma_on_leave_.html.

¹⁴ Felix Utama Kosasih. "Indonesia and ASEAN : Where are We Going?". 30 Juli 2015.

<http://www.globalindonesianvoices.com/21846/Indonesia-and-asean-where-are-we-going/>. diakses 13 Desember 2018.

¹⁵ Anna Maria A. Role of Indonesia in the Evolution of ASEAN. *The Journal of East Asian Affairs*. ol. 31, No. 1 (Spring/Summer 2017). 29.

¹⁶ Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L. P. Marsudi Tahun 2016. 11.

¹⁷ Rizki Akbar H. 11 Desember 2018. Kemlu: Negosiasi ASEAN-Tiongkok Soal Laut Tiongkok Selatan Selesai 3 Tahun Lagi. <https://www.liputan6.com/global/read/3805254/kemlu-negosiasi-asean-tiongkok-soal-laut-Tiongkok-se-latan-selesai-3-tahun-lagi>. diakses 8 Maret 2019.

Sea (SOM on DOC) di Guiyang, Tiongkok Mei 2017.¹⁸ Pada KTT ASEAN - RRT September 2016 disepakati “*Hotline of Communications*” untuk merespon *maritime emergencies* dalam pelaksanaan *Declaration of Conduct*.¹⁹

Namun demikian, Indonesia tetap menekankan kepemilikan atas Kepulauan Natuna yang dijadikan titik dasar terluar wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia telah secara resmi mengganti nama wilayah laut yang tumpang tindih dengan *nine dash line* milik Tiongkok menjadi Laut Natuna Utara yang diresmikan pada tanggal 14 Juli 2017 yang lalu. Perubahan nama ini juga telah didaftarkan ke PBB diikuti oleh protes Tiongkok terhadap pemerintah Indonesia.²⁰ Beberapa konflik dengan Tiongkok juga terjadi di Natuna seperti insiden penangkapan kapal Kway Fey 10078 dan 8 awak kapal oleh KP HIU 101 pada 19 maret 2016 dibarengi dengan penambahan kekuatan militer Indonesia di Natuna dan pengerahan kapal perang ke Natuna.²¹ Sikap Indonesia terkait insiden yang terjadi di Natuna yang terkesan mengkonfrontasi Tiongkok sangat berbeda dengan sikap diplomatis yang Indonesia jalankan di masa pemerintahan Presiden SBY. Perubahan orientasi pemerintahan Presiden Jokowi dalam politik luar negeri menghadapi sengketa Laut Tiongkok Selatan ini menjadi latar belakang bagi penulis untuk menganalisa fungsi ASEAN bagi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

1.2 Rumusan Masalah

¹⁸ Berlianto. 19 Mei 2017. ASEAN - Tiongkok Sepakati Coc Framework Laut Tiongkok Selatan. <https://international.sindonews.com/read/1206437/40/asean-tiongkok-sepakati-coc-framework-laut-tiongkok-selatan-1495177700>. diakses 7 Maret 2019.

¹⁹ Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L. P. Marsudi Tahun 2017. 5.

²⁰ Dwi urdaningsih. 14 Juli 2018. Indonesia Resmikan Penggunaan Nama Laut Natuna Utara. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/14/ot2hbc368-Indonesia-resmikan-penggunaan-nama-laut-natuna-utara>. diakses 7 Maret 2019.

²¹ D. E. Weatherbee. (2016). Re-Assessing Indonesia’s Role in the South China Sea. *ISEAS Perspective*, 18(2016), 2.

ASEAN telah menjadi representatif bagi negara anggotanya dalam memperjuangkan kepentingan negara anggotanya terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan. Presiden SBY menyatakan bahwa Indonesia merasa terpanggil untuk berada di garda terdepan dalam menyelesaikan sengketa antara Tiongkok dengan beberapa negara anggota ASEAN dengan damai karena dalam politik luar negeri pun Presiden SBY menjadikan ASEAN sebagai pusat dari kebijakan luar negeri Indonesia. Sebagai negara *non-claimer*, Indonesia kemudian menawarkan diri untuk menjadi pihak mediator dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Pada pemerintahan Presiden Jokowi kepentingan rakyat menjadi prioritas dan dijadikan sebagai pusat dari aktivitas diplomasi luar negeri Indonesia. Sikap Indonesia terkait insiden yang terjadi di Natuna dengan menambah kekuatan militer dan pengerahan kapal perang ke Natuna terkesan mengkonfrontasi Tiongkok dan sangat berbeda dengan sikap diplomatis yang Indonesia jalankan di masa pemerintahan Presiden SBY yang mengutamakan cara-cara diplomatis. Adanya perubahan pendekatan dari pemerintah Indonesia terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan menjadi alasan bagi peneliti untuk menganalisa lebih jauh bagaimana fungsi ASEAN bagi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

1.3 Pertanyaan Penelitian

“Bagaimana fungsi ASEAN bagi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan tinjauan Sengketa Laut Tiongkok Selatan?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi fungsi ASEAN bagi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menggunakan argumentasi Dewi Fortuna Anwar dengan tinjauan Sengketa Laut Tiongkok Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya: Secara akademis penelitian ini dapat membantu penulis dan pembaca dalam memahami bagaimana Indonesia berperan dalam sistem internasional yang dalam hal ini berada di ruang lingkup ASEAN. Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca agar dapat memahami isu yang peneliti angkat dalam tulisan ini. Kemudian yang terakhir, melalui penelitian ini penulis berharap tulisan ini bisa menjadi referensi bagi pembaca yang tertarik dengan isu fungsi ASEAN bagi Indonesia terutama pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

1.6 Studi Pustaka

Dalam penelitian mengenai peran Indonesia didalam ASEAN dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, penulis menggunakan beberapa sumber sebagai acuan dasar dalam penelitian ini diantaranya adalah:

Pertama, sebuah penelitian yang berjudul “Reorientasi Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Joko Widodo, 2014-2019” yang ditulis oleh Ludiro Madu.²² Reorientasi kebijakan luar negeri Indonesia memperoleh momentumnya ketika Joko Widodo populer dipanggil Jokowi mengambil kantor kepresidenan

²² Ludiro Madu. (2014). Reorientasi Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Joko Widodo, 2014-2019. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur*, 9(2), 104.

Indonesia. Meskipun terjadi peningkatan peran aktor-aktor non-negara dalam perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri dikarenakan proses demokratisasi, presiden tetap memegang peran penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Di bawah Presiden Jokowi, Indonesia berupaya menjadi poros maritim global dengan memprioritaskan pengembangan isu-isu yang berkaitan dengan maritim, termasuk didalamnya ruang lingkup kebijakan luar negeri. Orientasi pemerintahan Presiden Jokowi ini jelas meninggalkan slogan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu “*A million friends zero enemy*” yang telah ditunjukkan Indonesia selama 10 tahun (2004-2009 dan 2009-2014).

Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai berani mengambil resiko terganggunya hubungan bilateral dengan negara-negara sesama anggota ASEAN demi tercapainya kepentingan nasional meskipun dapat berpotensi mengganggu kesatuan ASEAN. Dalam hampir tiga bulan pertama pemerintahannya, pemerintahan Presiden Jokowi telah memperlihatkan bahwa kepentingan dan kedaulatan nasional diprioritaskan melampaui kepentingan regional Indonesia di ASEAN. Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat terletak pada tujuan pembahasan perubahan orientasi Kebijakan luar negeri Indonesia dimana penulis bertujuan untuk menjadikan hal tersebut sebagai titik balik awal mula penelitian.

Kedua, sebuah penelitian dari Annamaria Artner dengan judul “*Role of Indonesia in the Evolution of ASEAN*”.²³ Penelitian ini berusaha mendeskripsikan langkah-langkah dan pencapaian dalam membangun komunitas regional baik di bidang politik dan ekonomi, mengidentifikasi kesulitan dalam memperkuat integrasi ekonomi dengan memperhatikan kepentingan dan kebijakan Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa saat ini Indonesia masih tertarik pada kerja sama

²³ Anna Maria A. (2017) Role of Indonesia in the Evolution of ASEAN. *The Journal of East Asian Affairs*. ol. 31, No. 1 (Spring/Summer 2017). 1-38.

politik keamanan di ASEAN dan tetap melanjutkan kerjasama integrasi ekonomi yang lebih dalam karena alasan daya saing. Kepemimpinan baru sejak 2014 memiliki pandangan yang lebih luas dalam spektrum kebijakan luar negerinya oleh karena itu Indonesia mungkin kurang memperhatikan kerja sama di dalam ASEAN yang berpotensi menghambat perkembangan organisasi Asia Tenggara ini. ASEAN tidak pernah begitu sukses dalam integrasi ekonomi seperti Uni Eropa atau bahkan integrasi negara-negara Eropa Timur (COME-COM) sebelumnya. Pergeseran penekanan dalam kebijakan luar negeri ke arah peran politik regional ASEAN yang lebih luas dapat menurunkan aktivitas kerjasama sehingga integrasi kawasan juga dapat menurun. Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat terletak pada tujuan pembahasan peran Indonesia di masa lalu dan kemungkinan di masa depan terkait kerjasama di ASEAN yang digunakan untuk analisa lebih dalam mengenai fungsi ASEAN bagi Indonesia.

Ketiga, sebuah penelitian dengan judul “*Indonesia in ASEAN : Regional Leadership dan Ambiguity*” yang ditulis oleh Felix Heiduk.²⁴ Menurut beberapa peneliti, perubahan orientasi politik luar negeri Indonesia dapat dilihat sesaat setelah terpilihnya Presiden Jokowi. Fakta retorik tentang ASEAN, kebijakan ASEAN Jokowi sebenarnya tidak lebih atau kurang ambivalen terhadap integrasi kawasan dari pendahulunya. Terlebih lagi, sebulan setelah Presiden Jokowi bertugas Indonesia akhirnya meratifikasi *ASEAN Haze Agreement*. Hal lain yang secara rutin di perhatikan adalah munculnya keengganan Indonesia terhadap peningkatan integasi ekonomi di dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan kebijakan proteksi ekonomi yang dikeluarkan dibawah pemerintahan Presiden Jokowi.

²⁴ Felix Heiduk. (2016). Indonesia in ASEAN: Regional leadership between ambition and ambiguity.

Preferensi kebijakan dan minat utama Indonesia *vis-a-vis* ASEAN pada umumnya, dan integrasi regional khususnya, pada umumnya terletak dibidang pertahanan dan keamanan. Indonesia berperan penting dalam pengembangan APSC yang merupakan pilar pertama ASEAN *Community* dengan memberikan gagasan dan konsep kebijakan. Sejalan dengan hal ini, Indonesia telah menerapkan perjanjian regional yang relevan. Sehingga, kekhawatiran bahwa Indonesia akan berpaling dari ASEAN adalah sebuah hiperbola, karena tidak ada bukti yang meyakinkan telah ditemukan di bidang pertahanan dan keamanan. Sampai saat ini, ASEAN masih dipandang sebagai pusat dari arsitektur keamanan kawasan. Sebagai contoh, salah satu preferensi Indonesia adalah resolusi damai dalam konflik yang terjadi dan berdasarkan hukum internasional, yang juga di gunakan oleh EU. Namun demikian, kerjasama Indonesia dengan ASEAN tidak hanya sebatas pilar pertama dalam APSC, contohnya dalam bidang HAM dan manajemen bencana. Kerjasama yang telah berjalan antara Indonesia, ASEAN dan negara partner harus tetap dijaga dan bila mungkin harus di tingkatkan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat adalah perbedaan fokus pembahasan dimana penelitian Felix Heiduk melihat peran Indonesia di ASEAN secara umum.

Keempat, sebuah penelitian berjudul “Indonesia di Laut Tiongkok Selatan : Berjalan Sendiri” yang ditulis oleh Aaron L. Connelly.²⁵ Di bawah Presiden Jokowi, Indonesia merubah pendekatan terhadap persengketaan Laut Tiongkok Selatan dari pemain aktif menjadi lebih berfokus melindungi kepentingan nasional di Kepulauan Natuna. Presiden Jokowi kurang berminat melakukan diplomasi regional dan lebih berfokus pada pendekatan unilateral yang menyebabkan negara-negara lain di Asia Tenggara menjadi lebih terisolasi dan rentan terhadap tekanan diplomasi Tiongkok

²⁵ A. L. Connelly. 2017). “Indonesia di Laut Tiongkok Selatan: Berjalan Sendiri”. *Lowy Institute for International Policy*.

daripada saat berada di masa pemerintahan Presiden SBY. Presiden Jokowi terus memperkuat posisi Indonesia di Kepulauan Natuna, baik melalui pengiriman tenaga militer maupun peningkatan kegiatan ekonomi yang diarahkan negara.

Namun, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi belum menjalankan peran kepemimpinan yang efektif di ASEAN terkait isu Laut Tiongkok Selatan karena tiga alasan; Pertama, sikap Indonesia yang tidak memihak telah lama membuat Indonesia bersikap skeptis mengenai keberpihakan pada satu sisi. Kedua, Presiden Jokowi sendiri merasa skeptis akan manfaat konsep abstrak yang diperjuangkan dan *summit diplomacy* (diplomasi melalui pertemuan tingkat tinggi). Ketiga, Presiden Jokowi ingin mempertahankan hubungan yang baik dengan Tiongkok untuk memastikan upaya meningkatkan investasi Tiongkok yang lebih besar untuk proyek-proyek infrastrukturnya dapat terlindungi.

Kepemimpinan Indonesia di dalam ASEAN akan memberi perlindungan kepada negara anggota ASEAN yang lebih kecil untuk mengambil sikap melawan agresi Tiongkok. Akan tetapi, tanpa kepemimpinan Indonesia yang kuat, ASEAN akan terus mengalami kesulitan mencapai konsensus terkait isu ini, dan Tiongkok akan terus mengambil keuntungan dari perpecahan ASEAN untuk terus mengejar ambisinya di Laut Tiongkok Selatan, dengan konsekuensi diplomasi yang kecil saja. Konsensus ASEAN bukanlah solusi untuk tantangan-tantangan di Laut Tiongkok Selatan; namun, tidak adanya konsensus membuat pengelolaan tantangan-tantangan itu semakin sulit. Keengganan Indonesia untuk memimpin ASEAN juga melemahkan kepentingan Indonesia dalam mengurangi ketegangan regional dan mencegah Asia Tenggara menjadi tempat kompetisi antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat adalah penggunaan informasi adanya indikasi

keengganan Presiden Jokowi terhadap ASEAN dan implikasinya terhadap fungsi ASEAN bagi Indonesia.

Kelima, sebuah penelitian dengan judul “*ASEAN, Tiongkok and the Code of Conduct in the South China Sea*” yang ditulis oleh Carlyle A. Thayer.²⁶ Sengketa wilayah dan maritim saat ini di Laut Tiongkok Selatan adalah gangguan besar dalam hubungan antara Tiongkok dan negara anggota ASEAN (Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam).

ASEAN telah mengalami kesulitan mencapai konsensus di antara anggotanya yang beragam mengenai kebijakan Laut Tiongkok Selatan. ASEAN juga mengalami kesulitan untuk menegaskan sentralitasnya dalam berurusan dengan Tiongkok. Tiongkok mengklaim "kedaulatan yang tak terbantahkan" atas sebagian besar Laut Tiongkok Selatan, dan menegaskan bahwa perselisihan ini diselesaikan secara bilateral oleh negara-negara yang bersangkutan secara langsung. Sejak tahun 2002, ASEAN telah berupaya untuk mendapatkan persetujuan Tiongkok terhadap Kode Etik yang mengikat di Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok tidak bisa lagi mengabaikan peran diplomatik Indonesia, negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G-20, dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang proaktif. Selain itu, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Filipina semuanya mendukung upaya diplomatik ASEAN saat ini.

Laut Tiongkok Selatan akan terus menjadi agenda utama untuk pertemuan ASEAN-Tiongkok mendatang. Pernyataan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi (dikutip di atas) menunjukkan bahwa Tiongkok tidak terburu-buru untuk menyepakati perjanjian tentang COC. Tiongkok kemungkinan akan menguji persatuan ASEAN dengan terlebih dahulu mendesak agar kegiatan kerja sama dan langkah-langkah membangun kepercayaan dalam DOC dilaksanakan terlebih dahulu. Upaya

²⁶ C. A. Thayer. (2013). ASEAN, Tiongkok and the code of conduct in the South China Sea. *SAIS Review of International Affairs*, 33(2), 75-84.

diplomasi ASEAN untuk membentuk posisi bersama di Laut Tiongkok Selatan akan menunjukkan kepada para anggotanya bahwa kepentingan mereka saling bergantung, dan keamanan nasional dapat ditingkatkan dengan menggabungkan kedaulatan di bawah naungan ASEAN. Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat terletak pada penggunaan tinjauan sejarah tentang evolusi kebijakan Laut Tiongkok Selatan ASEAN dari tahun 1992 hingga 2013, ketika Tiongkok akhirnya setuju untuk memulai konsultasi resmi tentang COC.

1.7 Kerangka Berpikir

1.7.1 Fungsi ASEAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka berpikir yaitu argumen yang dikemukakan oleh Dewi Fortuna Anwar yang menyatakan bahwa ada delapan alasan pentingnya ASEAN bagi Indonesia. Delapan alasan pentingnya ASEAN bagi Indonesia sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menjadikan ASEAN sebagai *cornerstone* Indonesia dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Argumen ini tercantum dalam disertasi PhD dari Dewi Fortuna Anwar dengan judul “*ASEAN as an Aspect of Indonesian Foreign Policy*”.²⁷ Berikut delapan fungsi ASEAN bagi Indonesia :

1. ASEAN membentuk dan menjaga citra Indonesia sebagai tetangga yang baik bagi stabilitas kawasan.

Dari awal kemerdekaan Indonesia, kebijakan politik luar negeri Indonesia “Ganyang Malaysia” Presiden Soekarno berdampak pada memburuknya hubungan Indonesia dengan negara-negara barat khususnya Inggris, Amerika Serikat dan aliansi-aliansinya. Indonesia juga di cap sebagai negara yang agresif dan merupakan ancaman bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan mengikat diri dalam

²⁷ D. F. Anwar. (2017). Indonesia, ASEAN and Regional Stability. *Inaugural Lecture as a Member of the Social Science Commission of the Indonesian Academy of Sciences*, 24.

ASEAN, Indonesia telah berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan negara di kawasan. Citra Indonesia yang negara yang agresif, anti negara komunis dan anti barat mulai membaik. Kelanjutan peran Indonesia di ASEAN masih dan akan terus dibutuhkan untuk mempertahankan citra Indonesia sebagai negara yang cinta damai di kawasan. Dalam mengkonfirmasi fungsi ini, penulis menetapkan beberapa indikator, yaitu : sikap aktif Indonesia melibatkan ASEAN dalam upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan, komitmen Indonesia dalam membantu upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan dan pernyataan-pernyataan pemerintah dalam bentuk pidato maupun dokumen pemerintahan yang menyatakan dukungan Indonesia terhadap proses penyelesaian sengketa.

2. ASEAN mendorong harmonisasi kawasan

Pembentukan ASEAN berkaitan erat dengan peningkatan situasi harmonis di kawasan, berbeda sekali jika dibandingkan dengan situasi sebelum tahun 1967. ASEAN telah berhasil dalam menjaga tensi dan mencegah terjadinya konflik terbuka antar negara anggota karena manifestasi komitmen untuk menjaga dan memelihara kerjasama dan kawasan yang aman. Sampai saat ini prinsip non-intervensi masih diterapkan oleh negara anggota ASEAN untuk menjaga kerjasama yang telah terjalin di antara negara anggota. Sebagai institusi, ASEAN juga telah mampu membangun nilai, norma, dan aturan yang mengikat negara anggota untuk menghindari penggunaan kekerasan serta mengutamakan jalan damai dalam mengatasi konflik yang terjadi. Dalam mengkonfirmasi fungsi ini, penulis menetapkan beberapa indikator, yaitu : perjanjian/kesepakatan yang disetujui oleh ASEAN dan negara yang terlibat dalam sengketa sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan, peran aktif negara anggota untuk menjadi mediator dalam konflik yang terjadi sebagai

bentuk komitmen terhadap kerjasama di kawasan, pertemuan-pertemuan yang diadakan untuk mengupayakan penyelesaian sengketa yang terjadi yang diadakan secara formal oleh ASEAN maupun oleh negara anggota ASEAN.

3. ASEAN berperan sebagai *buffer* keamanan

Dikelilingi dengan negara tetangga yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia karena sesama anggota ASEAN menjadi *buffer* keamanan bagi Indonesia. Artinya kemungkinan ancaman yang datang adalah dari negara diluar kawasan yang letaknya jauh dari teritorial Indonesia. Katakanlah jika ada ancaman dari utara, maka yang merasakan dampaknya bukan Indonesia terlebih dahulu sehingga akan memberi waktu bagi Indonesia untuk memperkuat pertahanan dari ancaman yang akan datang. Ketika terjadi perang dingin, negara anggota ASEAN saling bersatu untuk melawan ancaman bersama seperti ancaman komunisme. Akhir dari perang dingin dan masuknya anggota baru ASEAN menjadi sepuluh member yang diantaranya adalah negara komunis tidak mengurangi fungsi ASEAN sebagai *buffer* keamanan bagi Indonesia. Dalam mengkonfirmasi fungsi ini, penulis menetapkan indikator, yaitu : kerjasama-kerjasama militer yang dilaksanakan oleh negara anggota ASEAN yang berperan sebagai *buffer* keamanan di kawasan.

4. ASEAN berkontribusi dalam perkembangan otonomi aturan kawasan

Indonesia adalah negara anggota Gerakan Non Blok satu-satunya pada pembentukan awal ASEAN yang juga memiliki prinsip bebas-aktif dalam politik luar negerinya. Dengan prinsip itulah Indonesia percaya bahwa negara baru dan berkembang harus mandiri dan bertindak secara otonom dalam komunitas internasional serta tidak bergantung kepada negara *super power*. Indonesia berkeinginan agar tidak ada dominasi asing yang menguasai kawasan Asia Tenggara namun ditentukan oleh negara di kawasan sendiri. Indonesia berusaha keras agar

prinsip bebas-aktif dapat di implementasikan di dalam ASEAN sejalan dengan kemandirian dari pengaruh negara lain. Indonesia juga memainkan peran kunci dalam pembentukan deklarasi yang menyatakan bahwa ASEAN adalah *“Zone of peace, Freedom and Neutrality”* pada pertemuan pertama ASEAN di Kuala Lumpur pada tahun 1971. Dalam perkembangannya, Indonesia selalu menjadi yang terdepan dalam upaya peningkatan keamanan di kawasan, Indonesia juga berupaya menjadikan ASEAN sebagai organisasi kawasan utama yang memiliki tata tertib di kawasan. Dalam mengkonfirmasi fungsi ini, penulis menetapkan indikator, yaitu : pemanfaatan ASEAN sebagai alat atau media untuk menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan dimana upaya penyelesaian sengketa dilakukan di bawah kerangka ASEAN oleh negara anggota ASEAN.

5. ASEAN memainkan peran penting dalam meningkatkan power negara anggota dalam negoisasi internasional

ASEAN telah mendapatkan pengakuan sebagai organisasi kawasan yang paling sukses dalam mengembangkan kerjasama kawasan. Banyak negara-negara dan organisasi serupa di luar kawasan yang ingin menjalin hubungan dekat dengan ASEAN. Hal ini tidak hanya meningkatkan kekuatan ASEAN dalam negoisasi, namun juga berdampak terhadap kekuatan negara-negara anggota dalam bernegoisasi dengan pihak ketiga di luar lingkup ASEAN. Beberapa kasus memperlihatkan bagaimana identitas sebagai negara ASEAN dapat mempermudah negoisasi dalam mencapai objektif negara. Dalam mengkonfirmasi fungsi ini, penulis menetapkan indikator, yaitu : penghargaan/apresiasi dari aktor internasional seperti negara atau organisasi internasional terkait peran Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan.

6. ASEAN meningkatkan kredibilitas internasional Indonesia

Sejak awal, sebagai negara dengan teritorial luas, penduduk terbanyak dan GDP terbesar, Indonesia telah dianggap sebagai *primus inter pares* diantara negara anggota lainnya. Indonesia secara alamiah merupakan pemimpin yang diharapkan kepemimpinan dan perannya dalam ASEAN. Jika Indonesia tidak memainkan perannya, maka negara anggota lain akan merasakan dampaknya, hal ini dapat dilihat dari krisis multidimensial tahun 1990 sampai 2000-an. Selagi menjalankan perannya, kredibilitas Indonesia juga mengalami peningkatan di dunia internasional. ASEAN memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi representatif utama dari Asia Tenggara di kancah politik internasional. Dalam mengkonfirmasi fungsi ini, penulis menetapkan indikator, yaitu : otonomi aturan kawasan yang dimaksudkan dapat berupa deklarasi, perjanjian, protokol, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Laut Tiongkok Selatan.

7. ASEAN menjadi wadah bagi kerjasama militer bilateral diantara negara anggota ASEAN

ASEAN bukanlah wadah untuk kerjasama militer kawasan karena dapat menimbulkan kecurigaan bagi negara lain diluar kawasan. Namun demikian, militer dianggap penting dalam mencegah terjadinya konflik secara meluas di negara anggota ASEAN sehingga kegiatan militer aktif diadakan negara anggota berbentuk kerjasama militer. Contohnya adalah melalui latihan bersama, serta memfasilitasi kerjasama militer intensif baik bilateral maupun trilateral. Dalam rangka mempersiapkan negara anggota ASEAN dalam menghadapi bencana alam, ASEAN juga memfasilitasi latihan bersama multilateral dengan negara diluar ASEAN. Dalam mengkonfirmasi fungsi ini, penulis menetapkan indikator, yaitu : kerjasama militer bilateral yang diadakan antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya yang berkaitan dengan sengketa Laut Tiongkok Selatan.

8. ASEAN berperan dalam mendukung perkembangan ekonomi

ASEAN telah berkontribusi dalam perkembangan perekonomian Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, ASEAN telah mendukung perekonomian Indonesia melalui dua cara. Pertama, dengan mempromosikan keamanan kawasan, keamanan dan stabilitas Indonesia tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk menjaga pertahanan dan keamanan dengan teritorial yang begitu luas sehingga biaya tersebut bisa dialokasikan ke hal lain yang lebih krusial. Hal ini menjadi keuntungan bagi Indonesia karena dapat berfokus kepada permasalahan yang lebih luas yaitu kemiskinan dan ketidakadilan. Kedua, keterlibatan Indonesia di ASEAN memainkan peran dalam menarik investor dan bantuan luar negeri dari negara barat dan Jepang, terutama selama perang dingin. Melalui stabilitas keamanan kawasan, perkembangan dari kapabilitas pertahanan Indonesia ditentukan lebih banyak oleh kapabilitas ekonominya. Hal lainnya adalah dengan bergabungnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara ke dalam ASEAN maka terdapat populasi sebesar 600 milyar penduduk yang memiliki identitas yang sama yaitu ASEAN. Liberalisasi perdagangan ASEAN juga membuat pasar kawasan lebih penting untuk ekspor Indonesia lebih dari sebelumnya. Dalam mengkonfirmasi fungsi ini, penulis menetapkan indikator, yaitu : kesepakatan/kerjasama ekonomi yang terbentuk serta peningkatan perekonomian pada negara anggota ASEAN terkait dengan Laut Tiongkok Selatan.

Dari penjelasan kerangka berpikir penulis diatas, berikut rangkuman indikator yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini :

Tabel 1.7 Indikator Fungsi ASEAN Bagi Indonesia

No	Fungsi	Indikator
1	ASEAN membentuk dan menjaga citra Indonesia sebagai tetangga yang baik bagi stabilitas kawasan	1. Sikap aktif Indonesia melibatkan ASEAN dalam upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan . 2. Komitmen Indonesia dalam membantu

		<p>upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan.</p> <p>Pernyataan-pernyataan pemerintah dalam bentuk pidato maupun dokumen pemerintahan yang menyatakan dukungan Indonesia terhadap proses penyelesaian sengketa.</p>
2	ASEAN mendorong harmonisasi di kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian/kesepakatan yang disetujui oleh ASEAN dan negara yang terlibat dalam sengketa sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. 2. Peran aktif negara anggota untuk menjadi mediator dalam konflik yang terjadi sebagai bentuk komitmen terhadap kerjasama di kawasan. 3. Pertemuan-pertemuan yang diadakan untuk mengupayakan penyelesaian sengketa yang terjadi yang diadakan secara formal oleh ASEAN maupun oleh negara anggota ASEAN.
3	ASEAN berperan sebagai <i>buffer</i> keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama-kerjasama militer yang dilaksanakan oleh negara anggota ASEAN yang berperan sebagai <i>buffer</i> keamanan di kawasan.
4	ASEAN memainkan peran penting dalam meningkatkan <i>power</i> negara anggota dalam negoisasi internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan ASEAN sebagai alat atau media untuk menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan dimana upaya penyelesaian sengketa dilakukan di bawah kerangka ASEAN oleh negara anggota ASEAN
5	ASEAN meningkatkan kredibilitas internasional Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghargaan/apresiasi dari aktor internasional seperti negara atau organisasi internasional terkait peran Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan
6	ASEAN berkontribusi dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otonomi aturan kawasan yang dimaksudkan

	perkembangan otonomi aturan kawasan	dapat berupa deklarasi, perjanjian, protokol, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Laut Tiongkok Selatan.
7	ASEAN menjadi wadah bagi kerjasama militer bilateral diantara negara anggota ASEAN	1. Kerjasama militer bilateral yang diadakan antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya yang berkaitan dengan sengketa Laut Tiongkok Selatan
8	ASEAN berperan dalam mendukung perkembangan ekonomi	1. Kesepakatan/kerjasama ekonomi yang terbentuk serta peningkatan perekonomian pada negara anggota ASEAN terkait dengan Laut Tiongkok Selatan

Sumber : Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

1.8 Metode Penelitian

Metodologi penelitian dalam ilmu hubungan internasional merupakan suatu proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan oleh peneliti sebagai bentuk upaya untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu fenomena tertentu dalam hubungan internasional.²⁸

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan berbentuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha untuk membangun realitas dan memahami realitas tersebut dengan memperhatikan proses peristiwa dan otensitas.²⁹ Hal ini bertujuan untuk mendapatkan analisa yang lebih tajam dengan didasari fakta-fakta dan dinamika yang telah di publikasikan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian konfirmatif. Penelitian konfirmatif berasal dari serangkaian alternatif, hipotesis apriori mengenai beberapa topik yang

²⁸ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Ind onesia, 1994), 2-3

²⁹ Ruslinawa Soemantri, Gumilar. *Memahami Metode Kualitatif*. Journal Social Humaniora, Vol 9. 2005. 58.

menarik, diikuti oleh pengembangan desain penelitian (biasanya berupa penelitian bersifat eksperimental) untuk menguji hipotesis tersebut, pengumpulan data, analisis data, dan berakhir dengan kesimpulan induktif peneliti.³⁰

Dalam mengkonfirmasi fungsi ASEAN bagi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan tinjauan sengketa Laut Tiongkok Selatan, metode yang digunakan adalah *Tracing Process*. *Tracing Process* didefinisikan sebagai pemeriksaan sistematis bukti diagnostik yang dipilih dan dianalisis berdasarkan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang diajukan oleh peneliti.³¹ *Tracing Process* bertujuan untuk menetapkan kemungkinan eksplanasi yang mana dari beberapa lainnya yang konsisten dengan rantai bukti yang tidak terputus dari penyebab hipotesis terhadap efek yang diamati.³² Penelitian ini berusaha mengkonfirmasi fungsi ASEAN bagi Indonesia dengan tinjauan sengketa Laut Tiongkok Selatan menggunakan metode *Tracing Process* melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan penulis sebagaimana pada tabel yang terdapat di halaman 21.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan yaitu periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Adapun tujuan peneliti dalam membuat penelitian pada jangkauan tersebut ialah agar dapat mempermudah peneliti dalam menganalisa fungsi ASEAN bagi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan tinjauan sengketa Laut Tiongkok Selatan secara lebih spesifik.

³⁰ Jaeger, R. G., & Halliday, T. R. (1998). On confirmatory versus exploratory research. *Herpetologica*, S64-S66.

³¹ Collier, D. (2011). Understanding process tracing. *PS: Political Science & Politics*, 44(4), 823.

³² Bennett, A. (2004). Case study methods: Design, use, and comparative advantages. *Models, numbers, and cases: Methods for studying international relations*, 30.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis atau variable dependen merupakan unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, jelaskan dan ramalkan.³³ Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah negara Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indonesia menjadi unit analisis karena yang akan penulis kaji dalam tulisan ini adalah peran yang dijalankan Indonesia dalam ASEAN sebagai anggota dari sebuah organisasi kawasan.

Sedangkan unit yang berdampak terhadap unit analisis yang hendak diamati disebut sebagai unit eksplanasi atau disebut juga dengan variabel independen.³⁴ Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah ASEAN yang merupakan organisasi kawasan di Asia Tenggara. Tingkat analisis merupakan tingkatan objek yang menjadi fokus utama dalam pembahasan sebuah penelitian.³⁵ Tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada tingkat sistem. Hal ini ditentukan karena dalam penelitian ini penulis melihat tindakan yang diambil dan dilakukan oleh Indonesia yang berkaitan dengan ASEAN dimana kedua subjek berada dalam sebuah sistem internasional.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data-data dari sumber yang berbentuk literatur akademik berupa; buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, berita, dan website. Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta sejarah yang berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan.³⁶

³³ Mas'oed, 39.

³⁴ Mas'oed, 39.

³⁵ Mas'oed, 36.

³⁶ M.Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

Proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai cara yaitu melakukan observasi, pengumpulan dokumen dan pengumpulan bahan berupa audio-visual, sesuai dengan pandangan Creswell.³⁷ Untuk penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan tulisan-tulisan terdahulu, pengumpulan data berupa dokumen serta bahan audio-visual lebih cenderung digunakan seperti jurnal-jurnal ilmiah, berita-berita yang ada di koran dan dokumen lainnya.³⁸

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia terkait ASEAN dan sengketa Laut Tiongkok Selatan dapat diakses langsung dari halaman atau situs resmi pemerintah Indonesia. Selain itu, terdapatnya data-data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal maupun artikel penelitian, situs majalah resmi seperti BBC, New York Times serta sumber valid lainnya seperti Google Book dan situs jurnal terakreditasi seperti Science Direct maupun ASIST.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara dalam menemukan dan memberikan makna pada serangkaian data dalam melakukan suatu penelitian.³⁹ Menurut Miles dan Huberman, tahapan dalam analisis terbagi atas tiga, yaitu diawali dengan tahapan reduksi data berupa kategorisasi data berdasarkan konsep yang disusun secara sistematis, selanjutnya tahapan penyajian data yang mana tahapan ini menghubungkan antara data-data dengan konsep, dan terakhir tahapan kesimpulan dan verifikasi.⁴⁰

1.Reduksi Data

Pada tahapan ini peneliti akan mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan menjadi beberapa kategori. Pengelompokkan yang dilakukan

³⁷ John W. Craswell, 220-221.

³⁸ John W. Craswell, 220-221.

³⁹ M.Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 9.

⁴⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publication. 1994.18.

berdasarkan pada kategori politik luar negeri Indonesia terkait ASEAN dan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Data-data tersebut diambil sesuai dengan batasan waktu penelitian yang ditetapkan yaitu dari tahun 2014-2018. Setelah pengelompokan data dilakukan, peneliti akan membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan fungsi ASEAN bagi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan tinjauan sengketa Laut Tiongkok Selatan.

2. Penyajian data

Setelah membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, peneliti akan mengambil poin-poin penting dari bacaan tersebut dan menuliskannya kembali menggunakan kalimat peneliti tanpa mengubah arti dan ide dari peneliti sebelumnya. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap bahan bacaan yang telah dikumpulkan. Untuk memulai penelitian, peneliti akan menganalisis dari orientasi politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo dimana hal tersebut memiliki perbedaan dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Dari hal tersebut, peneliti akan menganalisis fungsi ASEAN bagi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan tinjauan sengketa Laut Tiongkok Selatan.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Setelah proses penyajian data berupa hasil analisis dan penerapan konsep dalam penelitian, peneliti akan mengambil kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan bahwa konsep dan kerangka berpikir yang digunakan peneliti mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi signifikansi penelitian dan bagaimana teknik mengelola penelitian tersebut yang dibagi kedalam latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Sengketa Laut Tiongkok Selatan : Dampaknya Terhadap ASEAN dan Posisi Indonesia

Bab ini berisikan penjelasan perkembangan sengketa Laut Tiongkok Selatan dan bagaimana sengketa ini memberikan dampak bagi negara anggota ASEAN. Bab ini juga akan membahas bagaimana posisi Indonesia terhadap sengketa yang terjadi.

Bab 3 : ASEAN Sebagai Media Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan Oleh Indonesia

Bab ini berisi penjelasan bagaimana pemerintahan Indonesia dari masa ke masa menggunakan ASEAN sebagai media untuk menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan serta perubahan-perubahan yang terjadi di setiap kepemimpinan, tindakan-tindakan serta kebijakan-kebijakan yang diambil dalam ruang lingkup politik luar negeri yang lebih luas dengan tinjauan Sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Bab 4 : Fungsi ASEAN Bagi Indonesia di Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Bab ini berisi analisa bagaimana fungsi ASEAN bagi Indonesia dibawah pemerintahan Joko Widodo dengan menggunakan argumen delapan fungsi ASEAN bagi Indonesia menurut Dewi Fortuna Anwar sebagai pembanding, kesesuaian

ataupun ketidaksesuaian serta realita yang terjadi dalam ranah politik luar negeri Indonesia dengan tinjauan sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Bab 5 : Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan penelitian terkait analisa bagaimana fungsi ASEAN bagi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo menggunakan kerangka berpikir delapan fungsi ASEAN bagi Indonesia yang di kemukakan oleh Dewi Fortuna Anwar.



